

PENDIDIKAN PEMILIH (*VOTER'S EDUCATION*) BAGI PEMILIH PEMULA SERTA URGENSINYA DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI

¹Suryanef, ²Al Rafni

^{1,2} *Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Padang 25171*
e-mail: suryanef@gmail.com, alrafni68@gmail.com

Abstrak. *Tulisan ini merupakan bagian dari kajian penelitian penulis yang berjudul Pengembangan Model Pendidikan Pemilih (Voter's Education) Bagi Pemilih Pemula Dalam Rangka Membangun Rasionalisasi Perilaku Memilih di Kota Padang. Salah satu persoalan krusial dalam pembangunan demokrasi adalah menanamkan nilai-nilai pada generasi penerus khususnya pemilih pemula agar memiliki rasionalisasi yang tepat dalam melakukan tindakan memilih dalam pemilu. Oleh sebab itu diperlukan studi yang mendalam tentang format pendidikan pemilih (voter's education) yang tepat sesuai dengan karakteristik pemilih pemula. Dengan demikian diharapkan mereka bisa lebih cerdas dalam menentukan preferensi politiknya dan turut berpartisipasi membangun kehidupan yang lebih demokratis.*

Kata kunci: *pendidikan pemilih, pemilih pemula, pembangunan demokrasi*

1. Pendahuluan

Pendidikan pemilih (*voter's education*) selama ini dirasakan belum lagi menjadi keseriusan pemerintah atau pun partai politik untuk melaksanakannya, terlebih bagi pemilih pemula. Padahal pemilih pemula merupakan pemilih yang cukup potensial dan signifikan bagi besaran perolehan suara partai politik atau calon pada pemilu maupun pemilihan kepala daerah (*pilkada*). Di Indonesia pada saat pemilu 2014 diperkirakan mencapai lebih 32 juta penduduk dalam segmen pemilih pemula.

Pemilih pemula sangat wajar menjadi incaran partai politik karena setidaknya memiliki dua makna penting, yaitu : (1) menjadi medan perebutan suara dalam pemilu ; dan (2) segmen ini menjadi penentu ramai tidaknya rapat umum partai politik yang memiliki makna penting untuk publikasi maupun mempengaruhi calon pemilih lainnya (Adman Nursal, 2004). Pemilih pemula seringkali digambarkan melalui perilaku sebagai berikut : (1) pemilih yang masih labil ; (2) pemilih yang memiliki pengetahuan politik yang relatif rendah ; (3) pemilih yang cenderung didominasi oleh kelompok (*peer-group*) ; (4) pemilih yang melakukan pilihan karena aspek popularitas partai politik atau calon yang diusulkan partai politik ; (5) pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (*TPS*) hanya sekedar untuk mendaftarkan atau menggugurkan haknya (Andi Faisal Bakri, dkk., 2012). Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa pemilih pemula merupakan kelompok masyarakat yang perlu diedukasi terus menerus agar menjadi pemilih yang cerdas dan rasional.

Lebih jauh, Pomper (1975) menyatakan bahwa pemilih pemula diasumsikan mempunyai perilaku politik yang khas. Penelitian *voting behavior* di Amerika menunjukkan bahwa pemilih pemula lebih tertarik dengan persoalan-persoalan politik dan melakukan tindakan politik yang secara kualitatif berbeda dengan golongan-golongan lainnya. Potensi pemilih kelompok ini mempunyai "dua mata". Di satu pihak ia bernilai positif, kalau saja kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Tetapi di lain pihak, kelompok ini juga mengandung kerawanan yang berdampak negatif. Profil dari

pemilih pemula tersebut juga dilatarbelakangi dari proses sosialisasi politik yang dialami. Sosialisasi adalah proses dimana individu secara pasif menerima nilai-nilai, sikap-sikap, peranan-peranan dalam masyarakatnya, sekaligus secara aktif mengembangkan pola kemandiriannya untuk menempatkan diri dan berperan dalam masyarakat dimana seseorang itu hidup.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa perilaku pemilih pemula biasanya masih labil, apatis, pengetahuan politiknya kurang dan untuk membedakannya dengan kelompok lainnya adalah pengalaman.. Untuk perlu dikaji lebih lanjut bagaimana bentuk pendidikan pemilih (voter's education) bagi pemilih pemula serta urgensinya dalam pembangunan demokrasi.

2. Pembahasan

2.1 Bentuk Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula

Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu. Sebagai suatu upaya pendidikan, maka pendidikan pemilih hendaknya adalah suatu usaha sistematis, komprehensif dalam memberdayakan pemilih. Dengan demikian pendidikan pemilih tidak hanya sebagaimana yang dibicarakan orang agar peserta didik dapat menjalankan hak pilihnya secara benar dan mengerti teknis pemilihan. Pendidikan pemilih bertujuan jauh dari sekadar itu. Ia harus direncanakan secara terperinci, sistematis dan terprogram dengan pilihan-pilihan materi yang berdayaguna, baik jangka pendek maupun jangka menengah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan pemilih belum terkoordinir dengan baik. Padahal tanggung jawab pendidikan pemilih tidak hanya pada KPU saja, tetapi tersebar pada semua segmen masyarakat. Oleh sebab itu partai politik tidak hanya melakukan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula hanya menjelang pemilu, tepatnya pada saat kampanye. Tetapi seharusnya mau menyusun program pendidikan pemilih ini jauh-jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan.

Kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik memang menarik minat pemilih pemula. Namun tidak seluruhnya serius menanggapi juru kampanye karena sebagian besar cenderung sekadar menikmati acara hiburan. Kampanye pemilu merupakan kegiatan partai politik peserta pemilu yang bertujuan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya suara dalam pemilu.

Dalam beberapa kasus, temuan penelitian menunjukkan keaktifan pemilih pemula mengikuti kampanye berada dalam kategori cukup baik. Sebagian pemilih pemula memiliki perhatian untuk mengikuti debat-debat politik dan menjadi sarana bagi penentuan preferensi politiknya. Menurut Anthony Downs dalam Efriza (2012) ada dua cara atau sifat perilaku memilih yakni pemilih rasional (*rational voters*) dan pemilih tradisional (*traditional voters*). Kelompok pertama adalah pemilih yang menggunakan hak pilih atas dasar rasio atau kehendak sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Sedangkan yang kedua adalah pemilih yang menggunakan hak pilih bukan atas dasar kehendak atau kemauan sendiri, melainkan atas dorongan orang lain seperti orang tua, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Pendekatan rasional mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan "penilaian" yang valid terhadap tawaran partai. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip pengetahuan, dan mendapat

informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangan yang logis.

Guna membentuk rasionalisasi perilaku memilih dari pemilih pemula diadakan *voter's education* oleh beberapa komponen seperti partai politik, KPU, pemerintah, atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Pendidikan pemilih (*voter's education*) bertujuan : (1) menumbuhkan kesadaran politik sejak dini ; (2) mampu menjadi aktor politik dalam lingkungannya ; (3) pendidikan electoral (sistem pemilu) ; (4) pendidikan kewarganegaraan ; (5) prosedur pemilu yang demokratis ; dan (6) akuntabilitas pemilu maupun penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut Hess dan Torney sebagaimana dikutip Efriza (2012) menyusun postulat empat buah model sosialisasi yang dapat juga diterapkan dalam pendidikan pemilih (*voter's education*) yaitu :

- 1) Model akumulasi (*accumulation model*). Tambahan harapan terhadap peran politik dilanjutkan dengan penambahan unit-unit pengetahuan. Model proses belajar ini adalah yang paling tegas ; model ini menyatakan semakin banyak informasi yang diperoleh dimasukkan kepada seorang anak, semakin banyak pengetahuan yang diperoleh anak itu. Hal ini bergantung kepada diperolehnya pokok-pokok informasi yang spesifik.
- 2) Model alih antar pribadi (*interpersonal transfer model*). Anak-anak, berkat sosialisasi keluarga dan yang lain, mengembangkan bermacam-macam hubungan dengan tokoh-tokoh penguasa. Anak ini memperluas hubungan itu berdasarkan pengalaman, hingga mencakup semua hubungan berikutnya. Kekuasaan presiden, misalnya, dapat dipahami sebagai sebuah proyeksi kekuasaan yang sama yang diwakili dalam tokoh seorang bapak. Pembentukan sikap politik dengan cara itu sangat sedikit bergantung pada informasi khusus.
- 3) Model identifikasi (*identification model*). Anak-anak mengambil sikap dari orang-orang penting yang lebih tua, biasanya ayah atau guru. Anak itu, yang memihak pada tokoh-tokoh seperti itu, mempergunakan mereka untuk membentuk suatu citra diri yang, jika kukuh akan memberikan dasar bagi afiliasi dari kaitan kelompok. Misalnya, anak-anak mengambil pilihan partai politik orang tua mereka, dan banyak diantara mereka berpegangan terus pada afiliasi-afiliasi itu selama sisa hidup mereka meskipun tidak mempunyai banyak pengertian mengenai apakah yang diwakili oleh afiliasi-afiliasi ini ketika pertamakali diindoktrinasi.
- 4) Model perkembangan kognitif (*cognitive-development model*). Proses berpikir anak didasarkan pada pemahaman konseptual mengenai ketertiban yang mengizinkannya untuk menerjemahkan pengertian mengenai tokoh individual menjadi suatu pengertian mengenai individu-individu yang serupa dan mengenai peran mereka dalam sebuah sistem politik. Menjamin pertumbuhan dalam pengertian konseptual, merupakan masalah pendidikan warganegara, yang seharusnya tidak sekadar mengindoktrinasi murid-murid dengan sikap yang “benar” terhadap pemimpin-pemimpin politik, atau terhadap warganegara, atau masyarakat tetapi terutama dalam sebuah masyarakat demokratis, adalah memperbesar kemampuan kognitif untuk memahami isu-isu dan politik dalam pengertian jaringan. Model ini bergantung pada perkembangan kemampuan untuk abstraksi.

Lebih lanjut temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pemilih yang diberikan oleh KPU, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang diteliti belum lagi dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Edukasi politik pemilih pemula yang hanya dilakukan menjelang pemilu mengakibatkan tujuan yang bersifat substansial seperti pemilih pemula memiliki kesadaran menjadi warga negara yang mampu memilih pemimpin dengan rasional belum sepenuhnya tercapai. Sehubungan dengan itu temuan penelitian menunjukkan terdapat beberapa strategi untuk melakukan pendidikan pemilih yaitu :

- 1) KPU, partai politik dan ormas dapat menciptakan pola pendidikan pemilih bagi pemilih pemula secara komprehensif sehingga dapat efektif.
- 2) KPU dapat bekerjasama dengan sekolah dan guru-guru PKn dalam mengelola kelas pemilu sehingga dapat diciptakan perangkat pembelajaran dengan pencapaian tujuan yang diharapkan.
- 3) Harus ada standar operasional prosedur yang jelas dalam melakukan pendidikan pemilih sehingga siapapun yang bertugas dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan norma dan aturan yang telah disepakati.
- 4) Harus ada pengawasan dari pemerintah daerah terhadap jalannya proses edukasi terhadap pemilih pemula.
- 5) Harus terdapat sistem jaringan yang memungkinkan kerjasama pada pihak manapun.
- 6) Harus bisa diakses oleh semua pemilih pemula.
- 7) Terdapatnya sistem evaluasi pendidikan pemilih pemula yang berkesinambungan.
- 8) Model pendidikan pemilih untuk pemilih pemula hendaknya bersandar pada kebutuhan khusus pemilih pemula.

Kemudian dari segi materi pendidikan pemilih, temuan penelitian menunjukkan bahwa materi-materi yang diberikan memang disesuaikan dengan kelompok sasaran, namun kumpulan materi-materi tersebut belum dapat dijadikan representasi materi yang ditujukan untuk membentuk literasi politik. Materi-materi pendidikan pemilih untuk pemilih pemula dalam membangun rasionalisasi perilaku memilih adalah : (1) hak dan tanggung jawab warganegara ; (2) fungsi pemilu dalam negara demokrasi ; (3) sistem pemilu dan rezim pemilu ; (4) menjadi pemilih yang cerdas ; (5) penyelenggara pemilu ; (6) pengawasan pemilu ; dan (7) pelanggaran pemilu.

Selanjutnya dari segi metode, temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU telah menggunakan beragam metode. Berbeda dengan partai politik dan ormas masih menggunakan metode konvensional atau memakai metode informal saja. Oleh sebab itu perlu direkonstruksi kembali metode-metode pendidikan pemilih yang cocok untuk pemilih pemula. Adapun metode-metode yang dapat digunakan adalah : (1) workshop/lokakarya ; (2) ceramah/sosialisasi ; (3) focus group discussion (FGD) ; (4) simulasi ; (5) touring demokrasi ; (6) bermain peran ; (7) kelompok teman sebaya ; (8) nonton bareng ; (9) penggunaan kesenian/media tradisional ; dan (10) metode BRIDGE. Metode BRIDGE (Building Resources in Democracy, Government and Election) merupakan metode pembelajaran orang dewasa yang partisipatif dengan mengedepankan contoh-contoh praktis seputar pemilu sehingga pemahaman peserta didik akan pentingnya pemilu diharapkan lebih maksimal.

2.2 Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula serta Urgensinya dalam Pembangunan Demokrasi

Para ahli meyakini bahwa warga negara yang memiliki pengetahuan merupakan parsyarat bagi kondisi berfungsinya demokrasi di suatu negara (Lutz, 2006). Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi politik seperti melaksanakan pendidikan pemilih yang kontinyu agar terbentuk pola pikir, sikap, dan preferensi politik yang rasional. Pemilih dalam proses demokrasi pada hakikatnya investor yang menanamkan investasi pilihannya terhadap sesuatu yang mengandung kepentingan publik. Pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pada rasionalitas.

Pemerintahan yang demokratis seharusnya memandang pentingnya pendidikan pemilih yang merupakan bagian dari proses sosialisasi politik pada masyarakat pada umumnya. Pemerintah seharusnya memandang pentingnya rakyat melek politik. Rakyat yang melek politik dapat menjadi mitra sekaligus pengkritik jalannya suatu pemerintahan yang demokratis. Selain itu dengan adanya pendidikan pemilih diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak memilihnya. Dengan kata lain terjadi perubahan sikap politik rakyat dari sinisme, kepasifan, dan apatisme politik beralih menjadi kegairahan, aktif, optimism politik, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.

Partisipasi politik mengacu kepada kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilih penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dapat bersifat otonom maupun dimobilisasi. Partisipasi otonom merujuk pada aktifitas masyarakat dalam berpolitik berdasarkan inisiatif sendiri, spontan, dan dilakukan secara sukarela. Sedangkan partisipasi yang dimobilisasi dapat digerakkan dengan imbalan materi atau dibawah ancaman tertentu (Huntington dan Nelson, 1994).

Partisipasi pemilih yang memiliki kesadaran akan pilihan politiknya merupakan target pendidikan pemilih dalam jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang ditujukan dalam pembentukan individu-individu yang melek politik dan dapat menentukan sifat, persepsinya mengenai politik serta memberikan ruang bagi peningkatan kepribadian politik dan kesadaran politik warga negara.

3. Kesimpulan dan Saran

Pendidikan pemilih (*voter's education*) merupakan agenda yang sangat penting karena proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak keterdidikan rakyat. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ia bisa mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu bentuk pendidikan pemilih untuk pemilih pemula diharapkan merujuk kepada karakteristik pemilih pemula tersebut seperti bagaimana penentuan strategi, materi, dan metode pendidikan pemilih tersebut didesain.

Dalam pembanguna demokrasi, pendidikan pemilih membawa konsekuensi lebih jauh yaitu demokratisasi struktur kemasyarakatan. Sehubungan dengan itu pendidikan pemilih bukan hanya diarahkan kepada upaya untuk mengubah sikap-sikap politik individual saja , tetapi juga berkontribusi bagi pembaharuan sistem politik, lembaga politik dan struktur masyarakatnya.

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan temuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) KPU Kota Padang dan organisasi kemasyarakatan kiranya dapat mempertimbangkan rekonstruksi model pendidikan pemilih yang dihasilkan melalui penelitian ini, baik dari segi strategi, materi dan metode pelaksanaannya sebagai kontribusi akademis dalam upaya membangun pemilih yang rasional, cerdas dan kritis dalam menggunakan hak pilihnya.
- 2) KPU Kota Padang sebaiknya merancang pola pendidikan pemilih yang lebih komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi, terutama dalam mendesain model pembelajaran pendidikan pemilih yang berorientasi pada kebutuhan pemilih pemula.
- 3) KPU Kota Padang sebaiknya secara intensif dan terprogram merancang bersama MGMP PKn bagaimana sebaiknya pelaksanaan kelas pemilu yang dapat secara efektif mewujudkan pemilih yang kritis dan cerdas, serta mampu meningkatkan kesadaran politik untuk berpartisipasi dalam pemilu secara bertanggungjawab.
- 4) Partai politik hendaknya lebih meningkatkan intensitas pendidikan politik yang dilakukan termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, tidak hanya menjelang pemilu. Disamping itu mendesain secara baik terkait dengan strategi, materi dan metode pelaksanaannya agar tujuan pendidikan politik, terutama dalam membangun literasi politik para warganegara termasuk pemilih pemula dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.
- 5) Partai politik sebaiknya tidak hanya memfokuskan diri pada pelaksanaan pendidikan politik terhadap kadernya, tetapi juga masyarakat umum terlebih para peserta didik yang notabene adalah generasi penerus kepemimpinan bangsa masa depan.
- 6) Organisasi kemasyarakatan sebaiknya secara intensif melibatkan diri dalam pendidikan pemilih, dengan menyusun sebuah desain program yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan selama ini. Hal ini dimungkinkan karena organisasi kemasyarakatan memiliki jaringan yang kuat dengan berbagai pihak, baik pemerintah, partai politik, lembaga filantropi, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adman Nursal. (2004). *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu : Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Faisal Bakti (Editor). (2012). *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta : Churia Press.
- Efriza. (2012). *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung : Alfabeta.
- Huntington, Samuel P. & Joan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lutz, George. (2006). *Participation, Information, and Democracy*. Rutger University.
- Pomper, Gerald. (1975). *Voter's Choice : Varieties of American Electoral Behavior*. New York : Doad, Mead Company.